

## MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN ERA OTSUS PAPUA

La Pona\*

\*Magister (S2) Kebijakan Publik Uncen Jayapura

### Abstract :

*Progress and problems of regional development in Papua special autonomy to the era, including the implications for public policy and the central government had made this region. Various public policies implemented since the former Dutch East Indies colony was integrated into the 1962's the Republic of Indonesia. A variety of public policy at the positive and negative implications for regional development and community development. Similarly, the 2001 special autonomy has also developed a variety of public policy. It is not known for certain whether public policies that have been through a process step that is true or not, according to the rules of science to public policy. Moreover, knowledge of public policy that is multi-disciplinary and inter-discipline can be said is a relatively new field of science in the curriculum of higher education in Indonesia. Until 2012 in Indonesia there are 5 (five) universities are here opened master in public policy sciences, and the fourth is Cenderawasih University by developing field of study Master (S2) of public policy at the beginning of 2012 which is the efforts of some academics in the field of development science and support the process of national development policies and the region.*

### Abstrak :

*Kemajuan dan permasalahan pembangunan daerah di otonomi khusus Papua untuk era, termasuk implikasi untuk kebijakan publik dan pemerintah pusat telah membuat wilayah ini. Berbagai kebijakan publik diimplementasikan sejak bekas koloni Hindia Belanda telah diintegrasikan ke dalam 1962 Republik Indonesia. Berbagai kebijakan publik di implikasi positif dan negatif bagi pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat. Demikian pula, otonomi khusus tahun 2001 juga telah mengembangkan berbagai kebijakan publik. Tidak diketahui pasti apakah kebijakan publik yang telah melalui tahapan proses yang benar atau tidak, menurut aturan ilmu pengetahuan untuk kebijakan publik. Selain itu, pengetahuan tentang kebijakan publik yang multi-disiplin dan antar-disiplin dapat dikatakan merupakan bidang yang relatif baru ilmu dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Sampai tahun 2012 di Indonesia ada 5 (lima) universitas di sini dibuka master dalam ilmu kebijakan publik, dan keempat adalah Universitas Cenderawasih dengan bidang studi Magister (S2) kebijakan publik berkembang pada awal tahun 2012 yang merupakan upaya beberapa akademisi di bidang ilmu pembangunan dan mendukung proses kebijakan pembangunan nasional dan daerah.*

**Keywords: Development, Strategy, Public Policy, Welfare**

Magister kebijakan publik merupakan program studi strata Dua (S2) yang dikembangkan pascasarjana Universitas Cenderawasih. Diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Perguruan Tinggi Nomor: 1980/E/T/2011 tertanggal 28 November 2011 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program-Program Studi Pada Universitas Cenderawasih, bersama beberapa program studi lainnya. Sesuai kalender akademik bulan Maret 2012 memasuki angkatan kedua. Sejak didirikan dan menerima mahasiswa di kampus lama gedung pascasarjana, mendapat respon positif kalangan sarjana berbagai disiplin ilmu. Dibanding

program studi lainnya maka bidang ilmu ini diminati banyak calon mahasiswa. Angkatan pertama di Kota Jayapura terdaftar 43 orang ter-seleksi 35 mahasiswa, angkatan kedua terdaftar 76 orang diterima 56 mahasiswa, angkatan ketiga berjumlah 48 mahasiswa, sedangkan angkatan ke-empat sudah terdaftar 38 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Sejumlah calon mahasiswa menunda kuliah karena alasan waktu dan akan mengikuti angkatan berikutnya. Jumlah mahasiswa ini belum termasuk rencana membuka kelas jauh atas permintaan beberapa kabupaten. Memang tidak perlu tergesa-gesa membuka kelas jauh, diperlukan

pembenahan akademik dan keilmuan. Bagi pengelola prinsip kualitas pendidikan diutamakan, dibanding mengejar target kuantitas.

Pengelola program studi menjalin kerjasama sesuai MoU Rektor Universitas Cenderawasih (Prof. Dr. B. Kambuaya, MBA) dengan para profesor dan doktor di lingkungan Universitas Cenderawasih, serta sejumlah Guru Besar, doktor dan teknokrat Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Bappenas dan staf khusus Kepresidenan RI untuk memperkuat program studi ini. Beberapa pengelola program studi lain mengatakan model kerjasama itu menguras dana program studi, betul, tetapi tidak mengapa, sebab bagi pengelola penguatan pengajar berkualitas dibidang kebijakan publik sangat penting dan dibutuhkan dalam mewujudkan kualitas program studi dan lulusan bidang ilmu “langka” di Indonesia ini. Prinsip dasar pengelolaan merupakan bentuk tanggungjawab moral akademis menyediakan program magister berkualitas dipercaya dan disegani di Indonesia. Terima kasih pada para ilmuawan dan teknokrat, yang sudah mau membantu penguatan program studi ini, dipusaran kesibukan luar biasa mereka di tempat kerja utamanya. “Demi Papua dan Universitas cenderawasih kami siap membantu”, begitu ungkapan mereka. Beberapa diantaranya dosen luar biasa universitas di luar negeri.

Ketika program magister ini awal mula diperjuangkan ke Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, sekitar pertengahan tahun 2011, cukup banyak kalangan akademisi di lingkungan Universitas Cenderawasih mempertanyakan program studi magister ini, karena dianggap sebagai bidang ilmu baru didengar dan asing ditelinga, bisa dibayangkan apalagi kalangan masyarakat luas. Bidang ilmu ini sebenarnya telah dikembangkan setidaknya oleh 4 (empat) Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia dengan berbeda-beda

konsentrasi atau peminatan. Pembukaannya melalui diskusi dan kajian intensif di beberapa kesempatan oleh pendirinya (Prof. Dr. La Pona, MSi dan Prof. Dr. Akbar Silo, MS), keduanya dosen Universitas Cenderawasih. Diskusi berawal dari keprihatinan dan analisis integrasi dan komprehensif terhadap berbagai permasalahan kebijakan pembangunan daerah ini. Pemahaman tentang minimnya ilmu kebijakan publik dimiliki para akademisi, teknokrat, birokrat, legislator, TNI, POLRI, LSM dan masyarakat sipil lain sehingga telah mempengaruhi tujuan dan keberhasilan pembangunan daerah selama ini.

Mendalami pembangunan daerah sejak tahun 1962 berintegrasi kedalam NKRI, maka para pendiri menyimpulkan; (1) kegagalan kebijakan pembangunan daerah ini diantaranya disebabkan ketidaktepatan menetapkan isu strategis, formulasi, implementasi, monitoring, evaluasi dan revisi kebijakan publik yang kemudian berimplikasi sulitnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (2) bidang studi Kebijakan Publik dibutuhkan para pimpinan daerah, perencana dan pembuat kebijakan, legislator, pengusaha, TNI/POLRI dan masyarakat sipil; (3) ilmu kebijakan publik tidak bersifat mono-disiplin tetapi multi-disiplin dan inter-disiplin; (4) dapat dikembangkan pascasarjana Universitas Cenderawasih dengan melibatkan para guru besar dan doktor beberapa disiplin ilmu; dan (5) pengembangan dan penguatannya dapat bekerjasama dengan para Guru Besar, doktor dan teknokrat di luar lingkungan Universitas Cenderawasih.

Studi kebijakan publik walaupun awalnya merupakan bagian dari studi ilmu administrasi negara, tetapi dalam perkembangannya lebih bersifat multi-disiplin, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik studi ilmu-ilmu sosial, hukum, ekonomi, politik, psikologi, kependudukan, sosiologi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ilmu lainnya. Fokus utama studi ini pada penyusunan

agenda, formulasi, adopsi, implementasi, evaluasi dan revisi kebijakan. Mencakup kebijakan bidang sosial, ekonomi, pendidikan, pertanian, lingkungan, kependudukan, kesehatan, transportasi, pertahanan, keagamaan, dan sebagainya. Kebijakan publik bersifat nasional, regional dan lokal berupa UU, PP, KEPPRES, INPRES, PERMEN, KEPPMEN, PERDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, PERDASUS, Keputusan Bupati/Walikota, dan lainnya.

Studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting, yakni pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi dan untuk tujuan politik. Dalam studi ini terdapat dua pendekatan yakni analisis kebijakan (*policy analysis*), dan kedua kebijakan publik politik (*political public policy*). Pendekatan pertama, analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan kebijakan (*policy formation*) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika. Pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada menggunakan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, lingkungan dan lainnya.

Berbagai kebijakan publik daerah umumnya belum disertai analisis kebijakan yang benar, karena memecahkan masalah yang salah dibandingkan gagal karena memecahkan masalah yang salah, akibat menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang benar. Atau, disebabkan subyektivitas atau kepentingan analisis atau *policy maker* sangat menonjol. Atau, karena kompleksitas masalah itu sendiri dan kemampuan *policy makers*. Masalah *forecasting* atau peramalan juga sering tidak diperhatikan, padahal proses ini akan mengetahui bagaimana kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik masa depan, kemudian dapat dilakukan intervensi melalui kebijakan pemerintah. Menyebabkan rekomendasi dan implementasi

kebijakan menjadi tidak atau kurang tepat. Berimplikasi pada tahapan monitoring dan evaluasi kebijakan publik.

Kebijakan publik di daerah dalam rancangan pembuatannya banyak belum dilakukan sesuai kaidah atau standar keilmuan, akibatnya pelaksanaannya tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Akhirnya tujuan dan manfaat tidak tercapai sebagaimana mesti. Berbagai peraturan atau kebijakan pemerintah daerah dibuat dengan minimnya ilmu pengetahuan kebijakan publik. Masih banyak perencana dan pembuat kebijakan belum memiliki ilmu kebijakan publik yang memadai. Padahal kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan formulasi, penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan revisi kebijakan.

Berbagai kebijakan publik selama ini belum dilakukan berdasarkan kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik. Apakah isu telah mencapai titik kritis tertentu dan jika diabaikan akan menjadi ancaman serius. Isu telah mencapai tingkat partikularitas tertentu dan berdampak serius. Isu menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, menyangkut memperlakukan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat, dan menyangkut suatu persoalan yang *fashionable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya). Beberapa kebijakan publik daerah bahkan disusun hanya berdasarkan kepentingan pimpinan daerah, seperti upaya pintas memaksimalkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemaksaan pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB), lebih berpihak pada pengusaha, tanpa

mempertimbangkan kondisi spesifik daerah dan masyarakat asli.

Banyak ditemukan tahapan kebijakan publik tidak dilakukan secara benar oleh pembuat kebijakan, seperti tahapan penyusunan agenda, padahal agenda *setting* adalah sebuah *fase* dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik, atau tahapan formulasi, adopsi, legitimasi, evaluasi dan revisi kebijakan. Berdasarkan sejumlah studi di daerah ini menunjukkan sejak berintegrasi dalam NKRI, ternyata pemerintah pusat dan daerah dalam membuat berbagai kebijakan publik kurang dilandasi pemikiran keilmuan dan/atau tahapan yang benar, karena minimnya ilmu pengetahuan ini. Kondisi ini berkonsekuensi pada kegagalan suatu kebijakan dan program pembangunan daerah serta berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan pembangunan, bahkan mengancam persatuan dan kesatuan NKRI.

Sejak Papua berintegrasi dalam NKRI, sampai pelaksanaan era Otonomi Khusus berlangsung sekitar 11 Tahun lamanya, pembangunan daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat asli belum juga tercipta secara signifikan. Padahal dalam era otonomi khusus dana pembangunan puluhan triliun sudah digelontorkan kepada jumlah penduduk relatif sedikit. Diantaranya disebabkan berbagai kebijakan publik dinilai tidak tepat. Kebijakan publik yang awalnya dikendalikan pemerintah pusat dan berlanjut pada era Otonomi Khusus terlihat belum juga berhasil, kebanyakan masyarakat masih hidup dalam kemiskinan absolut dan struktural, bahkan masyarakat menolak beberapa kebijakan pembangunan daerah, mengindikasikan adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah ini.

Diperlukan perubahan cara pandang terhadap kedudukan dan filosofi kebijakan publik. Saat ini, dinamika perkembangan filosofi dan kedudukan kebijakan publik, baik sebagai *science*

(*value*), *practice (fact)*, dan *constructive (ide)*, telah menjadi kajian yang menarik untuk ditekuni, dipelajari, dan dipraktikkan kalangan akademis dan praktisi dalam membangun suatu sistem kinerja institusi pemerintahan, bisnis, *civil society* yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Tema pokok yang mengemuka dalam dinamika kebijakan publik dalam *reinventing government* adalah *public policy and networking, policy analysis, policy process (policy formulation, implementation and evaluation)*. Pada konteks daerah di tanah Papua, masalah kebijakan publik menjadi salah satu dimensi penting dalam menata masa depan pembangunan daerah ini secara arif.

Keberadaan magister Kebijakan Publik dapat mendekatkan masyarakat dengan sarana pendidikan yang diinginkan. Masyarakat tidak perlu harus ke luar Papua dengan konsekuensi biaya sangat mahal serta melepaskan pekerjaan dan jabatan yang dipercayakan pimpinan sehingga semakin mendorong masyarakat mengikuti pendidikan lebih tinggi untuk semakin memantapkan kualitas sumberdaya manusia. Kondisi ini sejalan dengan keinginan pimpinan daerah yang tidak ingin pegawainya meninggalkan tugas dan atau jabatannya karena alasan mengikuti Pendidikan Tinggi. Para pimpinan daerah menginginkan peningkatan sumber daya manusia pegawai dengan menempuh pendidikan lebih tinggi sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan institusi, selain dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan realitas, perubahan dan perkembangan yang dipaparkan sebelumnya pada latar belakang permasalahan, maka Universitas Cenderawasih berinisiatif membuka bidang peminatan ilmu Kebijakan Publik secara mandiri, dalam rangka membantu dan ikut terlibat secara aktif menjawab permasalahan dan tantangan secara cerdas dan bijaksana terhadap setiap persoalan yang

diakibatkan perubahan lingkungan dinamis. Pengembangan program studi kebijakan publik bersifat multi-disiplin sesuai kondisi kepakaran di lingkungan Universitas Cenderawasih, dimana dosen pengajar relevan tersebar di beberapa fakultas di lingkungan Universitas Cenderawasih, dan para dosen kompetensi di universitas lainnya, di dalam dan luar Papua. Secara struktural kelembagaan program pendidikan magister (S2) Kebijakan Publik berada langsung dibawah pascasarjana Universitas Cenderawasih.

Dalam mengembangkan tugasnya maka magister Kebijakan Publik memiliki Visi Sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Kebijakan Publik dengan memperhatikan kekhususan daerah, budaya dan lingkungan dengan menjunjung tinggi kaidah ilmiah, profesional dan integritas. Untuk mewujudkan visi tersebut magister kebijakan publik mempunyai serangkaian misi yaitu *pertama*, menyelenggarakan kegiatan pendidikan jenjang Magister yang bermutu dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran ilmiah, integritas, dan profesionalitas; *kedua*, mewujudkan dan menyiapkan tenaga akademisi dan/atau tenaga ahli profesional di bidangnya yang memiliki keluasaan wawasan, pengetahuan, daya kritis, dan ketajaman analisis serta sanggup menyelesaikan setiap tugas yang dibebankan; *ketiga*, memberikan mata kuliah yang inovatif dan mampu bersaing dengan program magister sejenis lainnya; *keempat* menyelenggarakan, menganalisa, mengevaluasi, melestarikan, sertamenyebarkan ilmu Kebijakan Publik untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat luas; dan *kelima* menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan publikasi dalam rangka pengembangan iptek, pembangunan daerah, kualitas pemerintah daerah, dan kualitas kehidupan masyarakat

Sedangkan yang menjadi tujuan pendidikan magister Kebijakan Publik adalah *pertama*, menghasilkan lulusan magister Kebijakan Publik yang bermoral

akademik, berwawasan pembangunan, dan menjunjung tinggi profesionalisme; *kedua*, menghasilkan tenaga pemikir dan analis pembangunan yang memiliki kemampuan inisiatif, inovatif dan kreatif dalam menciptakan, mengalihkan, menyebarkan dan menerapkan ilmu kebijakan publik dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional; *ketiga*, menghasilkan model kebijakan pembangunan daerah dan nasional diantaranya berbasis pada ilmu kebijakan publik; *keempat*, melakukan kajian dan riset akademis dalam rangka menghasilkan pengembangan model kebijakan publik dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional; *kelima*, menyebarkan karya akademis melalui riset-riset ilmiah dalam upaya pengembangan ilmu kebijakan publik yang dapat digunakan mendukung proses percepatan pembangunan daerah dan nasional; *keenam*, menghasilkan model-model layanan publik dalam rangka mendukung terciptanya prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*; *ketujuh* meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan kebijakan publik dalam rangka mendukung proses pembangunan daerah dan nasional; *kedelapan*, mengembangkan aspek Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Cenderawasih dalam bidang pendidikan, pengabdian dan penelitian guna mendukung pembangunan daerah dan nasional; *kesembilan*, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintahan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan nasional; *kesebelas*, mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; *kesebelas* menciptakan suasana akademik yang sehat dan non-diskriminatif dalam meningkatkan kualitas SDM untuk mencapai profesionalisme; *keduabelas*, menghasilkan lulusan magister Kebijakan Publik yang berilmu dan tanggap terhadap kondisi khusus lingkungan, sosial dan budaya masyarakat; *ketiga belas*, menghasilkan

tenaga cakap, kreatif dan mandiri yang memiliki kemampuan mengelola dan berinovasi dalam bidang ipteks; *keempat belas* menghasilkan model Kebijakan publik yang mampu mengangkat taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan *kelima*, mampu menjawab kebutuhan magister Kebijakan Publik di Papua dalam rangka memenuhi kebutuhan staf dosen di lingkungan Universitas Cenderawasih serta instansi terkait yang relevan.

Terdapat 5 (lima) elemen kompetensi sesuai dengan SK KEPMENDIKNAS 045/U/2002, sebagai berikut; *pertama*, Landasan kepribadian, yaitu bertakwa kepada Tuhan YME, serta memiliki dasar kepribadian, moral dan kebangsaan yang kuat; *kedua*, penguasaan ilmu dan ketrampilan, yaitu mampu mengelola dan mentransformasikan konsep dan teori-teori ilmu Kebijakan Publik yang memerlukan pendekatan baru, dan mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta pada pengembangan ilmu Kebijakan Publik sehingga dapat dimanfaatkan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan masyarakat; *ketiga*, kemampuan berkarya, yaitu mengembangkan ilmu Kebijakan Publik sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan mengkomunikasikan hasil penelitian di bidang Kebijakan Publik dalam pertemuan ilmiah maupun jurnal ilmiah nasional dan internasional; *keempat*, sikap dalam perilaku dan berkarya, yaitu memiliki kepedulian kritis terhadap isu-isu di bidang Kebijakan Publik terkait dengan bidang studi lain terkait, mengembangkan wawasan sesuai dinamika perubahan masyarakat dan visioner mengelola sumberdaya masyarakat; dan *kelima*, pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat, yaitu mengembangkan perdamaian dunia dan kesejahteraan bangsa serta peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Lulusan magister Kebijakan Publik diharapkan dapat memiliki kompetensi

handal dalam: melakukan riset guna menemukan konsep dan teori baru yang memberi manfaat signifikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, memajukan kesejahteraan masyarakat, serta bermanfaat mengayakan khasanah IPTEKS, khususnya dalam bidang Kebijakan Publik. Menganalisis dan memecahkan masalah-masalah pembangunan daerah dan nasional dalam berbagai bidang yang relevan dengan keilmuan Kebijakan Publik. Memelopori pemanfaatan metode dan pendekatan baru yang memiliki nilai tambah lebih baik.

### **Justifikasi, Kompetensi dan Relevansi**

Justifikasi, kompetensi dan relevansi program magister Kebijakan Publik pascasarjana Universitas Cenderawasih dapat ditelusuri pada konteks kebutuhan keilmuan (*scientific need*), Kebutuhan Profesi (*profesional need*), Kebutuhan Institusi (*institutional need*), Kebutuhan Akademik (*academic need*), Kebutuhan Wilayah (*regional need*), Kebutuhan Calon Mahasiswa.

#### **1. Kebutuhan keilmuan (*Scientific need*)**

Kemajuan pembangunan nasional dan daerah saat ini dan kedepan membutuhkan berbagai pengembangan pendekatan, strategi, kebijakan dan program pembangunan. Kebutuhan ketepatan pembangunan perlu dibarengi dengan kemajuan berbagai ilmu pengetahuan yang harus dimiliki pemerintah (*state*), swasta (*private sector*), dan masyarakat sipil (*civil society*). Kebijakan pembangunan modern membutuhkan pengembangan dan penguasaan berbagai ilmu pengetahuan, diantaranya tentang kebijakan publik. Berbagai kebijakan pembangunan sangat perlu disertai dengan ketepatan penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik pada tingkat nasional dan daerah. Minimnya ilmu kebijakan publik menyebabkan berbagai tujuan pembangunan nasional dan daerah tidak tercapai sebagaimana mestinya. Kondisi ini berimplikasi pada

belum tercapainya tujuan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan daerah semakin kompleks membutuhkan konsep dan teori yang lebih maju pula tentang kebijakan publik. Negara sedang berkembang seperti Indonesia sangat memerlukan pemikiran-pemikiran lebih maju untuk menciptakan model-model kebijakan publik berbasis berbagai disiplin ilmu dan bidang pembangunan.

Tuntutan globalisasi, otonomi daerah (desentralisasi), demokrasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan *rule of law* dalam proses pembangunan nasional dan daerah mengharuskan setiap kebijakan publik harus berkembang dan dikembangkan. Kondisi ini mengharuskan pembuat kebijakan publik harus memiliki ilmu kebijakan publik yang terus pula berkembang. Kebijakan publik dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah perlu dilakukan secara integral. Untuk itu diperlukan pengembangan ilmu yang dapat menjadi *leading* sektor yang memadukan secara sinergis praktis segenap ilmu dan pengetahuan berhubungan dengan proses pembuatan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik. Ilmu kebijakan publik merupakan ilmu multi disiplin atau melibatkan berbagai ilmu pengetahuan. Mengisyaratkan pentingnya pembukaan Pendidikan Magister Kebijakan Publik berbasis multi disiplin dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan berbagai model kebijakan publik dalam pembangunan nasional dan daerah.

## **2. Kebutuhan Profesi (*Professional need*)**

Program pendidikan magister Kebijakan Publik adalah salah satu wadah untuk mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia profesional yang bertaraf Strata dua. Pembangunan nasional dan daerah akan lebih demokratis, berkeadilan, akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan *rule of law* menuju kesejahteraan masyarakat yang diidamkan maka harus didukung tenaga

akademis dan profesional. Para praktisi pembangunan harus mempunyai ilmu tentang cara membuat suatu kebijakan publik. Banyak pembuat kebijakan publik di daerah belum memiliki latar belakang ilmu tentang kebijakan publik. Dan salah satu kegagalan dan ketertinggalan pembangunan nasional dan daerah karena minimnya sumberdaya manusia aparat tentang ilmu kebijakan publik. Adanya program pendidikan ini akan mendukung terciptanya sumberdaya manusia yang ahli dalam bidang kebijakan pembangunan berdasarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

## **3. Kebutuhan Institusi (*institutional need*)**

Respon terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional dan daerah saat ini dan masa yang akan datang yang semakin kompleks dan kompetitif baik dari segi kuantitas maupun kualitas mengakibatkan kebutuhan penataan SDM yang baik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang *bersih* (*clean government*) sangat diperlukan. Pemerintah dalam otonomi khusus seperti Papua sangat dibutuhkan aparat pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan pembangunan. Aparat yang ahli dalam ilmu kebijakan publik dibutuhkan. Setiap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang berhubungan dengan kebijakan publik dan pembangunan membutuhkan disiplin ilmu ini. Karena itu pembukaan program magister Kebijakan Publik merupakan kebutuhan semua pihak yang sangat mendesak. Program pendidikan ini akan memperkuat dan meningkatkan peranan Universitas Cenderawasih dalam proses pembangunan nasional dan daerah.

## **4. Kebutuhan Akademik (*academic need*)**

Keberadaan program pendidikan magister Kebijakan Publik sangat menunjang program pendidikan di Universitas

Cenderawasih. Program studi Kebijakan Publik merupakan program studi multi-disiplin, dimana mempertemukan pendekatan beberapa ilmu terkait, seperti; ilmu administrasi negara, manajemen, politik, hukum, ekonomi, sosiologi, antropologi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kependudukan, lingkungan, geografi, sejarah, sosial, statistik, matematika dan ilmu lain yang berkaitan. Selain itu sebagai universitas yang telah meluluskan ribuan sarjana, dalam berbagai disiplin ilmu, yang sebagian besar bekerja di pemerintahan dan swasta. Sarjana lulusan Universitas Cenderawasih dan lainnya umumnya bekerja sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan nasional. Pengembangan program studi ini merupakan upaya peningkatan kemampuan akademik terutama bidang Kebijakan Publik berbasis berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Institusi keamanan membutuhkan ilmu Kebijakan Publik, agar bisa berperan maksimal dalam pembangunan daerah yang relatif spesifik secara sosial, budaya, ekonomi dan politik dibanding daerah lainnya di Indonesia. Peran aparatur negara dan praktisi pembangunan nasional dan daerah dengan latar belakang disiplin ilmu ini sangat besar dan dibutuhkan dalam menggerakkan proses pembangunan nasional dan daerah. Semua pihak terkait dituntut mempunyai ilmu ini secara memadai berbasis berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Para perencana, penentu dan pelaksana pembangunan daerah dituntut memiliki ilmu pengetahuan mumpuni tentang proses perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi kebijakan publik dalam berbagai bidang pembangunan.

### **5. Kebutuhan Wilayah (*regional need*)**

Ditetapkannya Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2001 dalam rangka percepatan pembangunan daerah ini, maka pemerintah sangat membutuhkan suatu kebijakan

publik yang tepat. Turunan dari UU 21 Tahun 2001 ini adalah Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Juklak, Juknis, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan SK Bupati/Walikota. Para penentu kebijakan pembangunan daerah ini sangat membutuhkan aparat atau pejabat yang memamami betul proses perencanaan, pembuatan, pelaksanaan, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan publik yang tepat. Sangat dibutuhkan aparat yang profesional di bidang kebijakan publik. Pendekatan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah ini perlu dilandasi suatu kebijakan publik yang tepat. Pengembangan Daerah Otonomi Baru (pemekaran) pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung membutuhkan kebijakan publik yang tepat, sesuai karakteristik khusus masyarakat dan daerah. Setiap pemerintah daerah membutuhkan kebijakan publik yang berbeda karena memiliki kekhususan daerah dan masyarakat. Karakteristik, struktur dan komposisi penduduk spesifik dan unik memerlukan kebijakan berbeda pula. Terlaksananya program pendidikan magister Kebijakan Publik akan mendukung pengembangan dan percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang kehidupan, yakni melalui meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam melaksanakan pembangunan daerah.

### **6. Kebutuhan Calon Mahasiswa**

Berdasarkan pengamatan pimpinan Universitas Cenderawasih, direktur pas-casarjana, pimpinan fakultas, guru besar (profesor) dan audiensi dengan beberapa instansi pemerintah, swasta, dan tokoh masyarakat, diketahui kebutuhan calon mahasiswa yang akan mendaftar untuk mengikuti magister ini cukup besar. Pertimbangannya adalah selain kebutuhan karier juga karena tuntutan perkembangan pembangunan nasional dan



daerah saat ini dan ke depan. Ilmu kebijakan publik dipandang perlu dan penting dipelajari dalam mendukung tugas, tanggungjawab dan kewajiban melaksanakan proses pembangunan terutama dalam menetapkan kebijakan publik di daerah ini. Program magister Kebijakan Publik dapat diikuti berbagai latar belakang pendidikan strata satu (S1). Banyak kalangan aparat dan pejabat pemerintah dan swasta, TNI, POLRI, dan LSM menyatakan berkeinginan mengikuti program studi ini karena dinilai sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Program magister (S2) Kebijakan Publik sebelumnya tidak ada di tanah Papua. Magister ini hanya ada 4 (empat) pada universitas di Indonesia, sedangkan universitas bagian tengah dan timur Indonesia belum ada. Kondisi tersebut menyebabkan animo calon mahasiswa untuk mengikuti program magister ini terhambat masalah kelangkaan dan hambatan informasi, kelangkaan program studi, hambatan geografis dan besarnya pembiayaan, karena harus berangkat dan menetap di Pulau Jawa. Padahal banyak dari mereka adalah pejabat pemerintah daerah yang apabila mengikuti studi ke Pulau Jawa maka harus melepaskan pekerjaan dan jabatan. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut maka pengembangan magister Kebijakan Publik adalah mendesak, penting dan dibutuhkan mendukung pembangunan.

Pada Oktober 2011 diumumkan rencana pembukaan magister S2 Kebijakan Publik, dan diketahui banyak calon mahasiswa ingin mendaftar. Calon mahasiswa banyak yang ingin mengikuti pendidikan tetapi diantaranya terkendala pembiayaan. Beberapa kabupaten menyatakan ingin menandatangani MoU apabila magister ini dibuka secara resmi sehingga menunjukkan pembukaan magister (S2) Kebijakan Publik mendapat respon baik masyarakat dan pemerintah daerah. Magister ini dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan staf dan

pejabat pegawai negeri, staf dan pejabat swasta, politisi, legislator, LSM, BUMD, BUMN, TNI dan Polri. Lulusannya menjawab kebutuhan pada lembaga-lembaga dimaksud.

#### **Kontribusi Lulusan**

Magister Kebijakan Publik memberikan kontribusi, sebagai berikut: (1) mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikan sarjanadalam berbagai bidang ilmu (multi-disiplin) yang bekerja sebagai staf dan pejabat pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat ke jejang Magister (S2); (2) menyelenggarakan dan mengem-bangkan kegiatan kajian, analisis, dan penelitian bidang Kebijakan Publik; (3) mengembangkan kelembagaan pendidi-kan Kebijakan Publik; (4) menyeleng-garakan pengabdian masyarakat tentang *applied science* dalam pengembangan ilmu kebijakan pembangunan, khususnya ilmu Kebijakan Publik; (5) menyeleng-garakan kerjasama dengan program magister perguruan tinggi lain yang telah memiliki pengalaman yang dapat di-andalkan dalam bidang Kebijakan Publik baik dalam maupun luar negeri, instansi pemerintah maupun swasta, dan lembaga lainnya.

#### **Perkembangan**

Dalam sejarahnya, sesungguhnya ilmu kebijakan publik bukanlah ilmu baru. Perkembangan ilmu kebijakan publik telah dimulai sejak akhir tahun 1960-an, sebagai hasil dari suatu pertemuan yang diselenggarakan *American School Social Research Council*. Program studi kebijakan publik didirikan pada tahun 1969 di *University of California* AS dan mengambil pendekatan *multidiscipliner* dan mengem-bangkan kurikulum yang membuat mahasiswa bisa menggunakan berbagai keahlian dalam analisis problem dan kebijakan (Le Roy Graymer, dalam Wayne Parsons, 2005). Ironisnya, di Indonesia dikategorikan sebagai “ilmu baru” dan masuk rumpun ilmu sosial. Dalam kompleksitas perkembangan pem-

bangunan nasional dan daerah, ilmu ini dinilai semakin dibutuhkan sehingga mendapat perhatian dan diminati banyak sarjana lulusan berbagai disiplin ilmu.

Dikawatirkan keterlambatan pengembangan bidang ilmu dan studi ini telah mengakibatkan gagalnya berbagai kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Diduga, berbagai kebijakan pembangunan daerah dan nasional belum dirumuskan, ditetapkan, dilaksanakan, di-monitoring, dievaluasi, dan direvisi sesuai dengan tahapan disiplin ilmu ini dan telah menyebabkan tujuan-tujuan kebijakan pembangunan tidak mencapai tujuan. Diduga, para perencana dan pembuat kebijakan selama ini kurang memahami ilmu kebijakan publik secara baik. Pemahaman dan kesadaran akan hal tersebut telah mendorong lembaga pendidikan tinggi dan para akademisi, khususnya Universitas Cenderawasih mengembangkan bidang studi ini. Berkembangnya ilmu ini di tanah Papua akan mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah.

Perencana dan pembuat kebijakan pembangunan daerah ini diduga belum memadai memiliki ilmu ini. Belum memahami proses dan tahapan formulasi, penetapan, implementasi, monitoring, evaluasi dan revisi kebijakan publik. Berbagai kebijakan dibuat didasarkan hanya pada pendidikan dan latihan (diklat) singkat dan atau sejumlah ilmu pengetahuan sepenggal-penggal tentang kebijakan publik dari mata kuliah relevan yang diperoleh ketika menempuh strata satu. Kondisi yang sama diduga ditemukan di daerah Indonesia lainnya, karena bidang ilmu ini memang belum lama berkembang dan masih terbatas dikembangkan Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam penelusuran diketahui pada dekade tahun 2000-an baru lah program studi ini dikembangkan di beberapa Perguruan Tinggi ternama dan dalam waktu bersamaan buku-buku, buletin dan jurnal ilmiah tentang kebijakan publik dapat ditemukan

diberbagai toko buku dan perpustakaan terkemuka di Indonesia.

Beberapa komentar mahasiswa kalangan pejabat angkatan pertama, sebagai berikut; "...harus diakui formulasi, penetapan, implementasi, evaluasi dan revisi kebijakan publik selama ini belum dilakukan berdasarkan kaedah konsep dan teori ilmu terapan ini...". "...bidang ilmu kebijakan publik merupakan ilmu baru bagi kalangan birokrat, legislatif dan masyarakat di daerah ini...". "... Dalam proses dan pengembangan pembangunan daerah dan masyarakat sangat membutuhkan bidang ilmu kebijakan publik...". "...terima kasih pascasarjana Universitas Cenderawasih telah mengembangkan program studi magister ini..." (mahasiswa, 2012).

### **Ilmu Kebijakan Publik**

Sebagai ilmu sosial multi-disiplin yang bersifat terapan, studi tentang kebijakan publik melibatkan banyak dimensi ilmu. Setiap kebijakan, sekalipun kelihatannya cukup sempit, pada umumnya dengan banyak aspek dan melibatkan pihak dalam masyarakat. Keterkaitan ini cenderung bertambah luas seiring dengan perkembangan IPTEK semakin cepat. Perkembangan IPTEK dalam pembangunan dan kehidupan manusia telah berdampak pada keperluan adanya kajian yang bersifat integral atau holistik dalam pemecahan masalah publik. Kekurangpahaman tentang ilmu kebijakan publik ini pulasempat mengemuka pada saat awal pembentukannya dengan munculnya wacana ilmu ini bersifat mono-disiplin dan diharuskan diasuh FISIP UNCEN. Tetapi setelah melalui diskusi mendalam semua pihak memahami mengaposisinya harus beradalangsung dibawah pascasarjana.

Ilmu kebijakan publik menjadi penting dalam proses pembangunan kini dan ke depan karena beberapa pertimbangan seperti alasan ilmiah dalam hubungan sebab akibat dari suatu kebijakan pembangunan, profesional, politik negara dan pemerintah. Dalam konteks pemerintahan daerah era otsus maka kajian

kebijakan publik ditujukan untuk lebih menjamin terwujudnya pemerintahan yang melaksanakan kebijakan khusus untuk masyarakat, terutama orang asli. Kebijakan publik disini berarti kajian yang lebih berorientasi pada demokrasi dan keputusan politik pemerintah daerah ini. Artinya, aspirasi pemerintah dan masyarakat merupakan kandungan pokok dalam rumusan kebijakan pembangunan dan telah menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan, yaitu; bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat (orang asli), dan pembangunan infrastruktur. Pertanyaannya adalah setelah hampir setengah periode pembangunan Otsus bagaimana pencapaian tujuan pembangunan 4 (empat) bidang prioritas pembangunan itu dan bagaimana melakukan evaluasi dan revisi yang tepat. Disini, posisi studi kebijakan publik menjadi penting.

Ilmu kebijakan publik akan mampu melakukan proses kebijakan pembangunan era otsus secara Komprehensif, integrated dan holistik terhadap prioritas bidang pembangunan, seperti; melakukan identifikasi dan perumusan masalah kebijakan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur. Dapat merumuskan secara lebih tepat agenda kebijakan prioritas dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan era otsus. Melakukan proses perumusan kembali kebijakan pembangunan prioritas, kemudian melakukan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan pembangunan prioritas. Dilanjutkan menetapkan implementasi dan evaluasi kinerja kebijakan kemudian melakukan revisi kebijakan, sehingga diharapkan sisa waktu otsus dapat lebih tercapai tujuan prioritas pembangunan.

Kebijakan publik sebagai ilmu sosial terapan dalam masyarakat yang hidup dan terus berkembang. Tidak ada masyarakat dimanapun, termasuk di papuayang ingin kehidupannya tidak berkembang. Sekalipun ilmu ini

mempunyai sisi-sisi yang bersifat universal, namun sebagai ilmu sosial terapan, sangat dipengaruhi lingkungan sosial yang ada, maka lingkungan sosial spesifik di Papua menjadi penting diperhatikan. Disinilah kebijakan perlindungan dan keberpihakan pada orang asli perlu diterjemahkan dalam kebijakan secara tepat, tidak seperti implementasinya saat ini, tidak jelas ukurannya. Kebijakan publik pada hakekatnya adalah intervensi pemerintah yang bertujuan mengubah keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan, atau mempercepat kemajuan peradaban dan kesejahteraan. Upaya perubahan atau kemajuanyang diinginkan memerlukan kebijakan publik yang tepat pula.

Kini, bidang ilmu ini telah berkembang dan menjadi salah satu aspek penting dalam penerbitan akademik. Terlihat dari bertambah banyaknya buku-buku berkaitan dengan kebijakan publik. Disiplin ilmu ini telah menjadi komponen signifikan dalam banyak mata kuliah dan program studi di berbagai disiplin ilmu serta bisa merupakan bidang ilmu yang sulit, karena kajiannya menyangkut atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. Wayne Parsons (2005) mengemukakan bahwa kita harus keluar dari batas-batas akademikusang untuk memahami kebijakan publik. Sifat multidisiplin dan inter-disipliner dari bidang inilah yang membuat pendekatan kebijakan publik menjadi menarik bagi pengajar maupun mahasiswa. Ide-ide dan teknik-teknik kebijakan publik melampaui semua batas antar-disiplin dan antar-subdisiplin. Ini semua menjadi sangat jelas ketika kebijakan publik diajarkan. Makanya, magister kebijakan publik berada langsung di bawah pascasarjana Universitas Cenderawasih dan membuka konsentrasi kebijakan kependudukan, otonomi daerah, dan sosial ekonomi. Tetapi dalam perjalanannya konsentrasi kebijakan kependudukan dan otonomi daerah paling banyak diminati mahasiswa.

Bidang ilmu ini berkembang makin mapan seiring membaiknya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kalangan akademis bahwa permasalahan pembangunan nasional dan daerah diantaranya disebabkan ketidaktepatan menetapkan isu-isu strategis, formulasi, implementasi, monitoring, evaluasi dan revisi kebijakan publik. Pengetahuan dan pemahaman para perencana dan pembuat kebijakan tentang kebijakan publik masih terbatas. Pembuat kebijakan pembangunan daerah diperkirakan masih banyak yang belum memahaminya secara tepat. Termasuk kategori apa itu wilayah *public* dan *private*, apalagi menganalisisnya. Dalam kondisi demikian pengembangan program studi ini merupakan suatu terobosan penting, strategis dan mendesak karena pemahaman dibutuhkan dalam mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah.

Dewey (1927) mengemukakan kebijakan publik menitik beratkan pada publik dan problem-problemnya. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Kebijakan publik merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah (Heidenheimer, 1990). Dye (1995) mengemukakan kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Nagel (1990) mengatakan kebijakan publik adalah studi tentang sifat, sebab, dan akibat dari kebijakan publik.

Riant Nugroho (2012) mengemukakan kebijakan publik dapat dipahami dalam dua pemahaman atau aliran, yaitu aliran kontinental, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan

hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi diantara institusi-institusi negara. Padahal, kebijakan publik adalah produk yang memperjuangkan kepentingan publik, berarti mensyaratkan pelibatan publik sejak awal hingga akhir, bukan didominasi eksekutif dan legislatif, lalu bagaimanakah kebijakan publik era Otsus? Apakah masyarakat sudah dilibatkan dan merasakan prioritas kebijakan publik selama ini? Terlihat lembaga eksekutif dan legislatif diduga secara sepihak menganggap bisa mewakili dan atau mengambil alih keberadaan, peran dan fungsi pihak publik. Keberadaan publik tidak mempunyai dukungan secara politik dan yuridis formal. Ini pula konsekuensi sistem politik Indonesia berorientasi pada sistem kontinental. Aliran anglo-saxonis cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik.

Dalam pemahaman demikian maka kita harus menghindari fokus yang "sempit" dan menggunakan pendekatan dan disiplin yang bervariasi. Analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari beragam disiplin ilmu yang mengandung orientasi problem dan kebijakan. Wildavsky (1979) mengemukakan analisis kebijakan adalah sub bidang terapan yang isinya tidak dapat ditentukan berdasarkan disiplin yang terbatas (tertentu), tetapi dengan segala sesuatu yang tampaknya sesuai dengan situasi dari masa dan hakekat dari persoalannya. Pemahaman ini pulalah diantaranya yang menyebabkan pendiri program ini tidak menempatkan program magister ini pada suatu fakultas, tetapi langsung berada dibawah program pascasarjana sebagai bidang ilmu multidisiplin dan bukan mono-disiplin seba-

gaimana pembagian sifat keilmuan dari Direktorat Pendidikan Tinggi.

Harold Lasswell (1971) dalam Wayne Parsons (1985) mengemukakan orientasi Kebijakan publik bisa diringkaskan sebagai orientasi yang *multi-method, multi-disciplinary*, berfokus pada problem (*problem-focused*), berkaitan dengan pemetaan kontekstualitas proses kebijakan, opsi kebijakan, hasil kebijakan, dan bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh (*overarching*) untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan dan karenanya ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat. Sifat keilmuan kebijakan publik inilah pula yang menyebabkan berbagai disiplin dan atau bidang ilmu dapat memasuki bidang kajian ini, sebagaimana latar belakang para mahasiswa magister kebijakan publik saat ini. Berbeda misalnya dengan mahasiswa magister ilmu sosiologi dan antropologi yang latar belakang bidang ilmunya relatif sama dan dikategorikan mono-disiplin.

### Wilayah Publik

Pengertian publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat dan umum. Hal ini dapat dilihat dari dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah "*what government do or not to do*". Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuinya. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik di sini adalah masyarakat. Oleh sebab itu, keputusan gubernur Provinsi Papua, seorang Bupati/Walikota atau kepala sekolah untuk mewajibkan stafnya atau muridnya memakai pakaian seragam tertentu tidak termasuk kebijakan publik, dan contoh lainnya. Keputusan Kepala Daerah dianggap

kebijakan publik apabila keputusan itu mencakup semua orang dalam hubungannya dengan tugas Kepala Daerah. Pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Bahwa kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategi. Oleh sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya (S.Z. Abidin, 2012)

Beberapa *area* (bidang) penting dalam kebijakan publik, seperti; bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, lingkungan, kependudukan, perumahan, kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, perencanaan tata kota, dan lainnya. Setiap pemerintah daerah memiliki kekhususan *area* pembangunan spesifik dan menonjol. Bagi pemerintah daerah di Papua, dengan beragam (kekhususan) geografis, kependudukan, lingkungan, *race*, sosial, budaya, ekonomi, dan afiliasi politik masyarakat mengharuskan beragamnya pula kebijakan publik, atau tidak boleh sama antar daerah atau disamakan dengan daerah lainnya di Indonesia. Analisis kebijakan publik pada *area-area* penting ini sangat perlu dilakukan. Tetapi apakah selama ini sudah dilakukan secara benar atau tidak, atau benarkah beragamnya persoalan di berbagai bidang pembangunan karena persoalan ketidaktepatan kebijakan publik. Benarkah menumpuknya problem di bidang utama pembangunan diantaranya karena lemahnya pengetahuan para perencana dan pembuat kebijakan. Pada masing-masing bidang itu pula dibutuhkan beragam peneliti menggunakan model penelitian kebijakan publik yang membahas problem, kebijakan dan mendukung ide-ide pembangunan yang lebih tepat ke depan.

Gagasan wilayah publik dan privat sudah dimulai pada masa Yunani dan Romawi Kuno yang bisa diekspresikan dalam istilah *Koinion* (yang bisa diartikan publik) dan *Idion* (yang bisa diartikan *privat*). Kalaupun kini terjadi perkem-

bedaan dan perbedaan cakupan atau batasan antar negara. Tetapi pada titik tertentu terdapat kesamaan tentang wilayah publik ini. Memang masih ada perbedaan pandangan tentang wilayah publik, misalnya ruang publik sebagai ruang yang bebas dari intervensi aktivitas ekonomi dan bisnis, dan ruang dimana ada batas yang jelas antara ruang publik dan privat. Pandangan tradisi Eropa Kontinental yang menganggap ruang publik sebagai ruang yang mencakup dunia bisnis dan perdagangan, di mana cakupan kehidupan *private* jauh lebih luas, dibanding pandangan negara Inggris dan Amerika. Dalam perkembangannya, penetras kebijakan publik ke dalam ruang yang oleh para ahli ekonomi dianggap sebagai ruang *private* mulai terjadi di hampir semua bidang kehidupan sosial. Di Indonesia, bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, perencanaan tata kota, pengembangan wilayah dan lainnya atau hampir semua bidang kehidupan diatur dengan regulasi dan atau diintervensi oleh negara.

Hingga kini masih banyak orang bertanya-tanya tentang makna atau cakupan wilayah publik itu, selain dalam kenyataannya maknanya terus berkembang dan berbeda, misalnya berbeda pula antara pemahaman Anglo-Saxon dan tempat lainnya di dunia. Para mahasiswa angkatan pertama pun awalnya masih banyak belum mengetahuinya secara baik. Wayne Parsons (2005) mengemukakan beberapa istilah yang lazim dipakai, seperti; kepentingan publik, opini publik, barang-barang publik, hukum publik, sektor publik, kesehatan publik, transportasi publik, pendidikan publik, siaran layanan publik, akuntabilitas publik, toilet publik, ketertiban umum (*public order*), dan utang publik (*public debt*). Maka kebijakan publik dapat dikaitkan dengan bidang-bidang tersebut. Kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan

*privat* atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama.

### **Otonomi Khusus**

Megister Kebijakan Publik menjadi pelengkap strategis mewujudkan tujuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Keberadaan bidang ilmu ini setelah Otsus dilaksanakan hampir ditengah jalan, sehingga berbagai kebijakan sudah ditetapkan dan dilaksanakan. Andai saja keberadaannya pada awal pelaksanaan Otsus maka bisa dipastikan kontribusi disiplin ilmu ini bermanfaat bagi para perencana dan pembuat kebijakan publik. Ilmu Kebijakan publik dan para legislator memiliki kaitan erat dalam analisis kebijakan pembangunandi wilayah pemerintahan masing-masing. Para politisi yang berada di lembaga legislatif diwajibkan memahami baik bidang ilmu ini, sehingga produk kebijakan bisa terlaksana, terimple-mentasi dan berhasil sebagaimana hara-pan pemerintah dan masyarakat, juga dapat melakukan pengawasan maksimal terhadap berbagai kebijakan pembangu-nan daerah dan nasional.

Dikuatirkangkalangan eksekutif dan legislatidengan beragam tingkat dan latar belakang pendidikan dan pengalaman, mengakibatkan kurang memahami baik produk yang dibuatnya, sehingga hanya meniru (*copy paste*) kebijakan-kebijakan publik yang sudah ada di daerah lainnya, termasuk di luar Papua. Karenasudah rahasia umum bahwa beberapa kebijakan kabupaten hanya meniru kebijakan pemerintah daerah lainnya. Mahasiswa angkatan pertama, kedua dan ketiga dari kalangan eksekutif dan legislatif mengakui sinyalemen dan dugaan itu serta mengakui pentingnya ilmu ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanpa memahami konsep

dan teori-teori formulasi, penetapan, implementasi, monitoring, evaluasi dan revisi kebijakan, maka sesuatu kebijakan tidak bisa mencapai tujuannya. Dalam pemahaman demikian maka disiplin ilmu ini wajib dimiliki pihak eksekutif dan legislatif.

Dalam pemahaman demikian maka diharapkan keberadaan magister ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh siapa saja yang berkepentingan di daerah ini, bahkan daerah luar Papua. Kebijakan meningkatkan SDM dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan secara terencana dan sinergis. Penguatan kalangan eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat sipil melalui pengembangan SDM, merupakan upaya strategis dan mendesak, karena berimplikasi pada perbaikan pembangunan. Tentunya ini hanya salah satu strategi yang perlu disepakati dalam upaya mengatasi persoalan kebijakan pembangunan dan melakukan revisi kebijakan era otonomi khusus apabila dalam evaluasi ditemukan perlunya perbaikan. Teori kebijakan publik akan semakin menambah ketajaman dan kemampuan setiap perencana dan pembuat kebijakan dalam merumuskan, mengimplementasi, memonitoring, mengevaluasi, dan melakukan revisi, khususnya kebijakan publik bagi penduduk asli yang menjadi prioritas pembangunan era otonomi khusus.

Prioritas pembangunan era otonomi khusus yang difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur bisa dikaji dari konsep dan teori kebijakan publik. Institusi pemerintah daerah yang menangani kebijakan atau program pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat apakah sudah melaksanakan pelayanan secara tepat atau tidak. Apakah instansi tersebut sudah melakukan pelayanan (publik) yakni tugas memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran orang asli sedemikian rupa sehingga terjangkau sampai kesemua kelompok tidak

mampu orang asli. Apakah program pemberdayaan ekonomi selama ini sudah mampu membangun produktivitas ekonomi masyarakat orang asli atau malah membangun ketergantungan terhadap pemerintah. Apakah tugas pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah dapat membuat setiap penduduk asli mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Konsep ini mengacu pada tugas pemerintah memberikan pelayanan non *profit*. Tercapai tidaknya konsep pelayanan dapat menggunakan alat ukur standar pelayanan minimum. Apakah pelayanan pemerintah daerah ini sudah memenuhi standar pelayanan minimum.

Studi bidang ini bisa dimulai dari mengumpulkan isu-isu strategis setiap bidang pembangunan daerah era otonomi khusus. Isu strategis dapat berupa masalah bersama maupun tujuan bersama. Isu-isu strategi di setiap daerah kabupaten/kota tentunya tidak semua sama, yang kemudian menggerakkan pemerintah daerah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan itu akan menjadi "hukum" bagi pemerintah daerah dan warganya. Setelah dirumuskan, suatu kebijakan publik kemudian dilaksanakan pemerintah daerah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat. Diperlukan tindakan evaluasi kebijakan publik sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah suatu kebijakan sudah dirumuskan baik atau belum dan diimplementasi dengan baik dan benar pula. Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan peminfaat. Apabila suatu kebijakan publik sudah dimulai sejak otonomi khusus tahun 2001, maka harusnya saat ini sudah menghasilkan *outcome* dalam bentuk *impact* kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan tulus yang

hendak dicapai sebagai kebijakan pembangunan selama otonomi khusus ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Keberadaan program studi magister kebijakan publik pascasarjana Universitas Cenderawasih dapat berperan penting, strategis dan mendesak dalam memperbaiki dan mempercepat pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Para pimpinan daerah, perencana dan pembuat kebijakan, legislator dan masyarakat sipil sangat membutuhkan bidang ilmu kebijakan publik. Apabila sebelum Otsus kebijakan publik belum

ditetapkan secara baik, maka dalam era otonomi khusus daerah ini diharapkan berbagai kebijakan publik yang dilakukan pemerintah daerah sudah melalui kaedah proses dan tahapan kebijakan publik. Pemerintah daerah era otonomi khusus perlu melakukan tahapan perumusan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan revisi kebijakan Publik secara baik dan benar, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya penduduk asli yang sudah ditetapkan harus mendapat perlakuan khusus, terutama orang asli yang hingga sekarang masih hidup dalam kondisi keterbelakangan dan kemiskinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin S.Z. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta
- Damin Sudarman. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bina Aksara. Jakarta
- Dewey J. 1927. *The Publik and Its Problem*. Holt. New York
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Alex Media Komputendo. Jakarta
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. Alex Media Komputendo. Jakarta
- Dunn Williams N. 2004, (1981), *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. *Analisis Kebijakan*. Elex Media Komputendo. Jakarta
- Easton David. 1965. *A System Analysis of Political Life*. New York: Willey
- Lasswell Harold dan Abraham Kaplan. 1970. *Power And Society*. New Heaven. Yale University Press
- Heidenheimer A. 1986. *Politics, Policy, and Polizey as Concepts in English and Continental Languages: an Attempt to Explain Divergences*, Review of Politics, 48 (1): 3-30.
- Nagel, S.S. (Ed).1990. *Polices Studies and the Social Sciences*. Lexington Books. Lexinton. Mass
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/04.M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Santoso Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Polgoy, Research Center For Politics and Government, DEpartement of Politics & Government-FISIPOL UGM. Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2010. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Subarsono. A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tangkiling Hessel Nogi S. *Kebijakan Publik: Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Balaiurang. Yogyakarta.
- Wayne Parsons. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Penerbit Kencana Prenada Group. Jakarta.